



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyesuaian kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf a dan huruf b ayat (3) disisipkan 1(satu) huruf yakni huruf a.1, huruf k dan huruf i ayat (3) diubah, diantara angka 1 dan angka 2 huruf p ayat (3) disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 1.a dan 1.b, diantara huruf u dan huruf v ayat (3) disisipkan 8 (delapan) huruf yakni huruf u.1, u.2, u.3, u.4, u.5, u.6, u.7 dan u.8, setelah huruf aa ayat (3) ditambah 1(satu) huruf yakni bb, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan yang berpedoman pada harga satuan regional, meliputi;
 - a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. Satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar Harga Satuan selain yang dimaksud pada ayat (2) namun dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, UnitSKPD, Staf Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Bendahara SKPD;
 - a.1. Honorarium Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - b. Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (untuk pengadaan barang (konstruksi);
 2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan barang (Non konstruksi);
 3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan jasa (Non konstruksi);
 - e. Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - f. Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan untuk Kegiatan Infrastruktur / Fisik / Konstruksi;
 - g. Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola;
 - h. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah;
 - i. Honorarium Kegiatan lomba-Lomba
 1. Honorarium Tim Penilai / Juri / Wasit;
 2. Honorarium Tim Official;
 3. Honorarium Pelatih;
 4. Honorarium Atlit / Kontingen;

5. Honorarium Tim Penyusun/Pembuat Soal Lomba dan Keabsahan;
6. Honorarium Panitia Pertandingan;
- j. Honorarium Pendukung Acara Seremonial / Upacara / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;
- k. Honorarium untuk Penyuluh dan Pendamping
 1. Honorarium Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Honorarium Ketua Rukun Warga/ Rukun Tetangga;
 3. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pendampingan kesehatan;
 4. Honorarium Guru TPA / MDA / Garin / Guru Swasta;
 5. Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat / Pendamping/Penyelia KUBE / PPKBK / Sub PPKBK / Satlinmas;
 6. Honorarium Masyarakat yang terlibat dalam Tim/Kepanitiaan kegiatan Pemerintah Daerah;
 7. Honorarium Pengurus Penggerak PKK Kota Bukittinggi;
 8. Honorarium Jumpa Pers;
 9. Honorarium Penyelenggaraan Jenazah Kasus Bencana/ Penyandang Masalah Sosial;
 10. Honorarium Veteran Pejuang untuk menghadiri Hari ulang Tahun Republik Indonesia;
 11. Belanja Jasa Advokat Bidang Tata Usaha Negara/Perdata /Pidana;
 12. Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum;
- l. Honorarium Pendataan, Survey dan Pendistribusian / Penyetoran dan Penilaian;
- m. Honorarium Tim Sidang Pelanggaran Perda
 1. Honorarium Penegakan Hukum;
 2. Honorarium Penegakan Denda Upaya Paksa;
 3. Honorarium Kegiatan Operasional Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 4. Honorarium Penyelidikan/Penyidikan;
 5. Honorarium Penuntutan/Sidang di Pengadilan Negeri;
 6. Honorarium Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- n. Honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu / mendukung program Pemerintah Daerah
 1. Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidental;

2. Honorarium Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri;
- o. Honorarium Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama;
- p. Belanja Jasa / Upah Tenaga Kerja
 1. Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak;
 - 1.a Belanja Jasa Upah Kerja dan Insentif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - 1.b Belanja Iuran Jaminan / Asuransi
 2. Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak;
- q. Uang Lembur
 1. Uang Lembur Hari Kerja / Hari Libur Biasa;
 2. Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu;
 3. Uang Makan Lembur;
- r. Belanja Jasa Kantor
 1. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Pengelolaan Sampah;
- s. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi
 1. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Cetak Harian;
 2. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid;
 3. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Cetak Mingguan;
 4. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid;
 5. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Majalah Nasional;
 6. Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi di Media Online;
 7. Liputan Kegiatan Pemerintah Kota;
 8. Iklan;
- t. Belanja Surat Kabar dan Majalah;
- u. Belanja Jasa Kawat/ Faximili / Internet;
 - u.1 Belanja Tagihan Telepon;
 - u.2 Belanja Tagihan Air;
 - u.3 Belanja Tagihan Listrik;
 - u.4 Belanja Penambahan Daya;
 - u.5 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
 - u.6 Belanja Jasa Konsultansi;
 - u.7 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
 - u.8 Belanja Jasa Penggantian Kerugian;
- v. Belanja Paket/ Pengiriman;

- w. Belanja Jasa Kebersihan Ruangan;
- x. Belanja Sewa Ruang / Rumah/Gedung Pertemuan;
- y. Belanja Makanan dan Minuman;
- z. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
- aa. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
 - 1. Hadiah Lomba/Penghargaan;
 - 2. Uang Penghargaan Atas Prestasi Siswa;
 - 3. Hadiah Pemenang Seleksi Duta Pelajar/Mahasiswa Genre;
 - 4. Hadiah Lomba Kepariwisata;
 - 5. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
 - 6. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
 - 7. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - 8. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
- bb. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
 - 1. BBM Operasional/Mobilitas Rutin Bulanan
 - 2. Operasional/Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)

- (4) Standar harga satuan Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Standar harga satuan Pemerintah Daerah yang berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Estimasi Dalam Pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Standar harga satuan Pemerintah Daerah lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 - (3) Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
 - (4) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum
3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Satuan biaya transportasi darat dari kota Bukittinggi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat (*Pulang Pergi/PP*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ketempat tujuan di kabupaten /kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

4. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Satuan biaya penggantian transportasi dalam Kota Bukittinggi merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam kota Bukittinggi bagi aparatur sipil negara, dan pihak lain untuk menghadiri kegiatan rapat/bimtek dan kegiatan sejenis diluar kantor didalam Kota Bukittinggi atau penugasan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD terkait yang kurang dari 8 (Delapan) jam di dalam kota bukitinggi, yang tidak menggunakan kendaraan dinas, diberikan biaya penggantian transportasi dalam bentuk lumpsum.

5. Ketentuan huruf g) angka 7 huruf k diubah, ditambah 7 (tujuh) angka setelah angka 7 huruf k, huruf i diubah, huruf e) angka 3 huruf l diubah, ditambahkan 1 (satu) angka setelah angka 8 huruf n yakni angka 9, angka 1 dan angka 2 huruf p diubah, ditambahkan 2 (dua) angka setelah angka 2 huruf p yakni angka 3 dan angka 4, ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf p yakni huruf g Pasal 41, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Standar harga satuan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan jasa (Non konstruksi);
 - 1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 - 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - 3. Dalam Hal PPK juga menjabat sebagai KPA atau yang juga menjabat sebagai Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), maka kepada yang bersangkutan dapat memilih salah satu jenis honorarium yang ada.
- b. Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 - 1. Honorarium PjPHP dan PPHP diberikan berdasarkan Paket Pengadaan
 - 2. Paket Pengadaan yang dimaksud adalah Paket yang pengadaannya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- c. Honorarium Tim Teknis Perencanaan kegiatan swakelola diberikan kepada PNS/Non PNS dari SKPD teknis yang mengerjakan perencanaan untuk SKPD lain.
- d. Honorarium Tim Penilai / Juri / Wasit untuk Kegiatan yang mempergunakan Koordinator dibayarkan paling Banyak Rp.1.000.000,- selama kegiatan.
- e. Honorarium Panitia Pertandingan;
 - 1. Honorarium Tim Oficial/ Pelatih/ Atlit/ Kontingen diberikan dalam rangka:
 - a) latihan/TC/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
 - b) mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kota Bukittinggi.
 - 2. Untuk latihan/TC/persiapan dan pertandingan yang dilaksanakan diluar Kota Bukittinggi diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan lampiran I dan II Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- f. Honorarium Pendukung Acara Seremonial/Upacara/ Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;
 - 1. Orgen Tunggal sudah termasuk Penyanyi.
 - 2. Pelaksana Upacara adalah Komandan Upacara/ Komandan Kompi/Perwira Upacara/Pengucap Upacara/ Pembaca Teks Upacara/Pengatur Acara/Pelatih/Penggerak Bendera/Pengawalan Vorijder dan Teknisi (Operator).

- g. Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum;
 - 1. Honorarium dibayarkan sesuai bulan pelaksanaan kegiatan.
 - 2. Honorarium dibayarkan setelah adanya laporan pelaksanaan kegiatan serta melampirkan daftar hadir.
 - 3. Jumlah tim dan anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).
 - 4. Pemberian jasa advokat dan jasa pembuatan dan perumusan produk hukum dapat melebihi besaran standar harga satuan yang telah ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- h. Honorarium Pendataan, Survey dan Pendistribusian/ Penyetoran;
 - 1. Form isian yang dimaksud adalah lembaran form yang terdiri dari item pertanyaan/variabel data yang dientrikan ke aplikasi.
 - 2. Honorarium dapat dibayarkan dengan melampirkan hasil cetak laporan entrian data dari aplikasi yang dimaksud.
 - 3. Honorarium Pendistribusian dan Penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 diberikan kepada petugas pendistribusian dan pengembalian blanko SPPT PBB-P2 petugas penyerahan dan pengembalian blanko SPPT untuk disetorkan
- i. Honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu/ mendukung program Pemerintah Daerah untuk Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil dibayarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan harian.
- j. Honorarium Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama diberikan kepada yang Tidak Menerima Tambahan Penghasilan PNS (TPP)
- k. Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak;
 - 1. Pegawai Kontrak merupakan Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD untuk kebutuhan Kegiatan SKPD dan dianggarkan dalam Kegiatan SKPD bersangkutan.
 - 2. Pegawai Kontrak merupakan Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD untuk kebutuhan Kegiatan SKPD dan dianggarkan dalam Kegiatan SKPD bersangkutan dengan menerima upah harian.
 - 3. Pengangkatan tenaga kontrak/honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan langsung oleh masing-masing SKPD atas persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4. Pemberhentian Tenaga Kontrak/Honorar diberlakukan sebagai berikut:
 - a) Tenaga yang dikontrak dengan SK Walikota diberhentikan dengan SK Walikota melalui BPKSDM.
 - b) Tenaga yang dikontrak dengan Perjanjian Kontrak Kepala SKPD diberhentikan oleh Kepala SKPD setelah mendapat Persetujuan Walikota.
 - c) Batas usia bertugas untuk semua tenaga kontrak/honorar adalah 58 tahun 0 bulan 0 hari yang dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
5. Ketentuan disiplin dan cuti tenaga kontrak/honorar berpedoman kepada aturan disiplin dan cuti Pegawai Negeri Sipil.
6. Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri / Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri / Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Bukittinggi.
7. Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko merupakan pegawai kontrak sebagaimana poin 1 yang dalam pekerjaannya mempunyai resiko fisik yaitu:
 - a) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran.
 - c) Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pengelolaan Sampah dan Pemootong Rumput/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Keeper dan Maintenance pada Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - e) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - f) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g) Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Juru Sembelih pada UPTD Rumah Potong Hewan.

8. Pegawai Kontrak yang Mempunyai Beban Kerja Lebih adalah:
 - a) Pegawai kontrak pada Badan Keuangan.
 - b) Pegawai kontrak pada Tata Usaha Walikota, Tata Usaha Wakil Walikota, Tata Usaha Sekretaris Daerah, Tata Usaha Asisten, Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Sopir Walikota, Sopir Wakil Walikota, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Rumah Dinas Walikota, Sopir Rumah Dinas Wakil Walikota dan Pertugas serta Pembantu Rumah Dinas Non PNS.
9. Upah Kerja adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
10. Upah Kerja Pegawai Kontrak dibayarkan berdasarkan kehadiran.
11. Pemotongan gaji dimaksud sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
12. Hari kerja adalah Senin s/d Jumat atau sesuai dengan kesepakatan/kebutuhan Kegiatan SKPD yang bersangkutan
13. Isi Perjanjian Kontrak Kerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja dan jenis pekerjaan yang bersangkutan
14. Pembayaran Gaji/ Upah Pegawai Kontrak disesuaikan dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur pada tahun berkenaan.
1. Uang Lembur;
 1. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan lembur dan pemberian uang makan lembur diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
 2. PNS/Non PNS melakukan kerja lembur diluar jam kerja untuk kepentingan dinas.
 3. Uang makan lembur diberikan dalam rangka tugas pokok dan fungsi bagi petugas lapangan yaitu:
 - a) Tugas-tugas operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Tugas-tugas operasional pada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran.
 - c) Tugas-tugas operasional pada Pengelolaan Sampah, Taman dan Pemotong Rumput/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d) Tugas-tugas operasional objek wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

- e) Tugas-tugas operasional pada perbengkelan, lampu jalan, pemeliharaan jalan/jembatan, irigasi dan drainase.
 - f) Tugas-tugas operasional penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g) Tugas-tugas operasional pengendalian lalu lintas dan jalan raya, terminal dan parkir pada Dinas Perhubungan.
 - h) Tugas-tugas operasional rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, BBIH dan pemeliharaan kuda bibit pada Dinas Pertanian dan Pangan.
 - i) Tugas-tugas operasional perpustakaan keliling pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - j) Tugas-tugas operasional kedewanan pada Sekretariat DPRD.
 - k) Tugas-tugas operasional Tata Usaha Pimpinan (TUP) dan tugas-tugas operasional Pantap pada Sekretariat Daerah.
 - l) Tugas-tugas operasional pemungutan pajak daerah dan tugas-tugas administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pegawai Non PNS pada Badan Keuangan.
 - m) Tugas-tugas operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kerja lembur yang dimaksud merupakan kerja dalam rangka tugas pokok dan fungsi bagi petugas lapangan dan tidak termasuk kerja dalam rangka kepentingan kegiatan.
 5. Uang lembur dapat diberikan untuk kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dan Uang Makan Lembur dapat diberikan apabila telah melaksanakan kerja lembur minimal 2 (dua) jam perhari.
 6. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran Uang Lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.
 7. Uang Lembur untuk Hari Libur dan Hari Libur Khusus diberikan dalam satuan orang per jam dengan Uang Makan Lembur diberikan 1 (satu) kali.
 8. Dalam hal Petugas Lapangan yang melaksanakan lembur dan mendapatkan Uang Makan Lembur, maka Uang Makan Lembur tidak dapat diberikan lagi.
 9. Uang lembur khusus pada hari-hari tertentu diberikan dalam rangka lembur pada cuti bersama Hari Raya Keagamaan sesuai ketentuan pemerintah.
 10. Uang lembur hari kerja dan hari libur biasa tidak dibayarkan kepada Kepala SKPD.

- m. Belanja Sewa Ruang / Rumah/Gedung Pertemuan;
 - 1. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil adalah ruangan dengan kapasitas s.d 50 orang.
 - 2. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang adalah ruangan dengan kapasitas s.d 200 orang.
 - 3. Ruangan Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Besar adalah ruangan dengan kapasitas di atas 200 orang.
- n. Belanja Makanan dan Minuman;
 - 1. Makanan dan minuman rapat/pertemuan/diklat/tamu/ kegiatan diberikan kepada kegiatan yang pesertanya melibatkan eselon II kebawah.
 - 2. Makan dengan nasi kotak lengkap diperuntukkan untuk menjamu tamu kedinasan.
 - 3. Makan dan snack dengan jasa katering diperuntukkan untuk kegiatan diklat/tamu
 - 4. Snack biasa diperuntukkan untuk kegiatan rapat/ penyuluhan /sosialisasi dan sejenisnya.
 - 5. Snack sedang/snack dengan menggunakan jasa katering dan snack berat diperuntukkan untuk kegiatan DPRD.
 - 6. Minum diberikan hanya untuk khusus lembur.
 - 7. Dalam hal lembur telah diberikan uang makan lembur, maka makan dan minum lembur tidak diberikan lagi.
 - 8. Makanan dan minuman harian/lembur dapat dicairkan dengan memberikan kupon/voucher rumah makan atau restoran kepada pegawai yang melaksanakan lembur.
 - 9. Biaya Konsumsi diperuntukkan bantuan konsumsi berupa snack untuk lokasi tujuan Field Trip.
- o. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - 1. Penghargaan/Reward Bagi Peserta Lomba yang Berprestasi Dalam Mewakili Kota Bukittinggi Pada Lomba Tingkat Propinsi / Nasional / Internasional.
 - 2. Hadiah Lomba Tingkat Kota / Propinsi/ Nasional Dalam Rangka Kegiatan yang Diadakan oleh SKPD yang Bersifat Insidentil.
- p. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga;
 - 1. Kelurahan diberikan apabila Pencapaian target penerimaan PBB-P2 pada bulan September realisasi penerimaan 100% dengan wajib pajak 65%, sesuai dengan lampiran.
 - 2. Kelurahan diberikan apabila Pencapaian target penerimaan PBB-P2 pada bulan November realisasi penerimaan 100% dengan wajib pajak 65%, sesuai dengan lampiran.

3. Kecamatan Pencapaian Target PBB-P2 Pada bulan September realisasi penerimaan 100% dengan wajib pajak 65%, sesuai dengan lampiran.
 4. Kecamatan Pencapaian Target PBB-P2 Pada bulan November realisasi penerimaan 100% dengan wajib pajak 65%, sesuai dengan lampiran.
- q. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1. BBM Operasional / Mobilitas Rutin Bulanan
 - a) Indek sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan Indeks estimasi kebutuhan BBM per-hari kerja dalam 1 (bulan) kalender. Realisasi berdasarkan kehadiran. Jumlah hari kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD
 - b) Bendahara adalah Bendahara Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara, Bendaharawan Penerimaan Pembantu.
 - c) Pengurus Barang adalah Pengurus Barang/Surat Berharga dan Pengurus Barang Pembantu.
 - d) Jenis BBM yang digunakan adalah Pertalite / Solar.
 2. Operasional / Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)
 - a) Maksimal diberikan 1 kali dalam satu hari pada saat pelaksanaan operasional / mobilitas kegiatan.
 - b) Indeks sebagaimana tercantum pada Lampiran tidak diperuntukkan bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, polisi pamong praja, Truck Roda 6 (enam) dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban dan Operasional ke PU an, Truck pengangkutan sampah, dan ambulan).
 - c) Indeks BBM sebagaimana dimaksud Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran serta efisiensi.
6. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
KETENTUAN PERALIHAN

7. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisip 2 (dua) pasal yakni Pasal 42A dan Pasal 42B, sehingga berbunyi:

Pasal 42A

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 53) untuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 masih mempedomani Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana yang telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 24) dan Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 1).

Pasal 42B

Dalam hal Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas untuk Non ASN dan Masyarakat yang belum diatur sebelumnya dapat berpedoman pada Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini untuk pembayarannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 April 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN : I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	75,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	150,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	225,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	300,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	400,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	500,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	600,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	700,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	800,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	900,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	1,000,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	1,100,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	1,200,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	1,300,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	1,400,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	1,500,000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	85,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	170,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	255,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	340,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	440,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	540,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	640,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	740,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	840,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	940,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	1,040,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	1,140,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	1,240,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	1,340,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	1,440,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	1,540,000
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	40,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	80,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	120,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	160,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	220,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	280,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	340,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	400,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	460,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	520,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	580,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	640,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	700,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	760,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	820,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	880,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	35,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	75,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	115,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	155,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	215,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	275,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	335,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	395,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	455,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	515,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	575,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	635,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	695,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	755,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	815,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	875,000
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	25,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	50,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	75,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	100,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	140,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	180,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	220,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	260,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	300,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	340,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	380,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OB	420,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OB	460,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OB	500,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OB	540,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	580,000
	1.1.6. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	150,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	200,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	300,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	400,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana Rp. 2,5 Milyar ke atas	OB	600,000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OP	250,000
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 Juta	OP	250,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	350,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OP	450,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OP	600,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OP	750,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	900,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OP	1,050,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OP	1,200,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OP	1,350,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OP	1,500,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	1,650,000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	1,800,000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	1,950,000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	2,100,000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	2,250,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 Juta	OP	300,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	400,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OP	500,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OP	650,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OP	800,000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	950,000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OP	1,100,000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OP	1,250,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OP	1,400,000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OP	1,550,000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	1,700,000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	1,850,000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	2,000,000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	2,150,000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	2,300,000
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi Rp. 50 Juta	OP	150,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OP	200,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 Juta	OP	250,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OP	300,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	350,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta sd. Rp.1 Miliar	OP	400,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OP	550,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OP	700,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	850,000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OP	1,000,000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OP	1,150,000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OP	1,300,000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OP	1,450,000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	1,600,000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	1,750,000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	1,900,000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	2,050,000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Triliun	OP	2,200,000
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	3,580,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	4,030,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	4,490,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4,940,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5,560,000
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	3,230,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	3,640,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	4,040,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4,450,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5,010,000
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OP	1,510,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OP	1,750,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OP	1,990,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OP	2,230,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	2,560,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	2,880,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Milyar sd. Rp. 750 Milyar	OP	3,200,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 Milyar sd. Rp. 1 Triliun	OP	3,520,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Triliun	OP	3,960,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)			
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)					
	1.3.1. Kepala	OB	1,000,000			
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750,000			
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA					
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas					
	URAIAN	Satuan	Tingkat Kelurahan/ Kecamatan	Tingkat Kota	Tingkat Provinsi	Tingkat Nasional
	Menteri atau setingkat Menteri/Pejabat Negara	OJ				
	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	200,000	1,400,000		
	Pejabat Eselon I	OJ	150,000	750,000	1,000,000	1,200,000
	Pejabat Eselon II.a / Forkopimda	OJ	100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Pejabat Eselon II.b	OJ	100,000	500,000	500,000	1,000,000
	Pejabat Eselon III	OJ	75,000	300,000	300,000	900,000
	Pembicara Khusus/Profesional	OJ	50,000	300,000	700,000	1,700,000
	1.4.2. Honorarium Moderator					
		Satuan	Tingkat Kelurahan/ Kecamatan	Tingkat Kota	Tingkat Provinsi	Tingkat Nasional
	Moderator	OK	50,000	300,000	300,000	700,000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara					
	Pembawa Acara	OK	50,000	100,000	200,000	400,000
	1.4.4. Honorarium Panitia					
	a. Penanggung Jawab				OK	450,000
	b. Ketua / Wakil Ketua				OK	400,000
	c. Sekretaris				OK	300,000
	d. Anggota				OK	300,000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN					
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksa Kegiatan					
	1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah					
	a. Pengarah				OB	1,500,000
	b. Penanggung Jawab				OB	1,250,000
	c. Ketua				OB	1,000,000
	d. Wakil Ketua				OB	850,000
	e. Sekretaris				OB	750,000
	f. Anggota				OB	750,000
	1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah					
	a. Pengarah				OB	750,000
	b. Penanggung Jawab				OB	700,000
	c. Ketua				OB	650,000
	d. Wakil Ketua				OB	600,000
	e. Sekretaris				OB	500,000
	f. Anggota				OB	500,000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksa Kegiatan					
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah					
	a. Ketua / Wakil Ketua				OB	250,000
	b. Anggota				OB	220,000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA					
	1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1,500,000			
	1.6.2 Honorarium Beracara	OK	250,000			
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL					
	1.7.1. SLTA				OB	2,100,000
	1.7.2. DI / DII / D III / Sarjana Terapan				OB	2,400,000
	1.7.3. SARJANA (S1)				OB	2,600,000
	1.7.4. MASTER (S2)				OB	2,800,000
	1.7.5. DOKTOR (S 3)				OB	3,000,000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	250,000			

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000
	b. Redaktur	Oter	400,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000
	b. Redaktur	Oter	300,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelolaan Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500,000
	b. Redaktur	OB	450,000
	c. Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Web Developer	OB	300,000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000
	b. Pengawas Ujian	OH	240,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/ Pelajaran	5,000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000
	b. Pengawas Ujian	OH	270,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Naskah/ Pelajaran	7,500
1.11.	HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi/Kota	Per Butir Soal	100,000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	b. Telaah Bahas Soal	Per Butir Soal	20,000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
	1.12.2. Honorarium Pengajar berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
	1.12.3. Honorarium Pengajar berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
	1.12.4. Honorarium penyusun Modul diklat	Per Modul	5,000,000
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	450,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	400,000
	3) Sekretaris	OK	300,000
	4) Anggota	OK	300,000
	b. Lama diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	675,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	600,000
	3) Sekretaris	OK	450,000
	4) Anggota	OK	450,000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	900,000
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	800,000
	3) Sekretaris	OK	600,000
	4) Anggota	OK	600,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)		
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	a. Pembina	OB	3,500,000		
	b. Pengarah	OB	3,000,000		
	c. Ketua	OB	2,500,000		
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000		
	e. Sekretaris	OB	1,500,000		
	f. Anggota				
	- Anggota tim perumus	OB	1,300,000		
	- Anggota tim teknis penyusun	OB	1,200,000		
	- Anggota tim teknis pembahas	OB	1,100,000		
	- Anggota tim teknis pengumpul dan pengolah data	OB	1,000,000		
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	a. Ketua	OB	1,000,000		
	b. Sekretaris	OB	900,000		
	c. Anggota	OB	600,000		
B.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
1.14.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
1	Nanggro Aceh Darussalam	OH	360,000	140,000	110,000
2	Sumatera Utara	OH	370,000	150,000	110,000
3	Riau	OH	370,000	150,000	110,000
4	Kepulauan Riau	OH	370,000	150,000	110,000
5	Jambi	OH	370,000	150,000	110,000
6	Sumatera Barat	OH	380,000	150,000	110,000
7	Sumatera Selatan	OH	380,000	150,000	110,000
8	Lampung	OH	380,000	150,000	110,000
9	Bengkulu	OH	380,000	150,000	110,000
10	Bangka Belitung	OH	410,000	160,000	120,000
11	Banten	OH	370,000	150,000	110,000
12	Jawa Barat	OH	430,000	170,000	130,000
13	DKI Jakarta	OH	530,000	210,000	160,000
14	Jawa Tengah	OH	370,000	150,000	110,000
15	DI Yogyakarta	OH	420,000	170,000	130,000
16	Jawa Timur	OH	410,000	160,000	120,000
17	Bali	OH	480,000	190,000	140,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440,000	180,000	130,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430,000	170,000	130,000
20	Kalimantan Barat	OH	380,000	150,000	110,000
21	Kalimantan Tengah	OH	360,000	140,000	110,000
22	Kalimantan Selatan	OH	380,000	150,000	110,000
23	Kalimantan Timur	OH	430,000	170,000	130,000
24	Kalimantan Utara	OH	430,000	170,000	130,000
25	Sulawesi Utara	OH	370,000	150,000	110,000
26	Gorontalo	OH	370,000	150,000	110,000
27	Sulawesi Barat	OH	410,000	160,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	430,000	170,000	130,000
29	Sulawesi Tengah	OH	370,000	150,000	110,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380,000	150,000	110,000
31	Maluku	OH	380,000	150,000	110,000
32	Maluku Utara	OH	430,000	170,000	130,000
33	Papua	OH	580,000	230,000	170,000
34	Papua Barat	OH	480,000	190,000	140,000
1.15.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS				
NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250,000	125,000	
2	Pejabat Eselon II	OH	150,000	75,000	

NO	URAIAN					SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.16.	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						
NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ASN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ ASN GOLONGAN III	ASN GOLONGAN I/II /Non PNS/PTT/ MASYARAKAT
1	Aceh	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	Riau	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	Jambi	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	Sumatera Barat	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	Sumatera Selatan	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	Lampung	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	Bengkulu	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	Bangka Belitung	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	Banten	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	Jawa Barat	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	DKI Jakarta	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	Jawa Tengah	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15	DI Yogyakarta	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	Jawa Timur	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	Bali	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	Kalimantan Tengah	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	Kalimantan Selatan	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	Kalimantan Utara	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	Sulawesi Utara	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	Gorontalo	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	Sulawesi Barat	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	Maluku	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	Maluku Utara	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	Papua	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	Papua Barat	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000
C.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT /PERTEMUAN DIDALAM DAN DI LUAR KANTOR						
1.17	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I						
NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE	
1	Aceh	OP	346,000	403,000	1,075,000	749,000	
2	Sumatera Utara	OP	276,000	365,000	800,000	641,000	
3	Riau	OP	225,000	335,000	690,000	560,000	
4	Kepulauan Riau	OP	230,000	360,000	790,000	590,000	
5	Jambi	OP	271,000	364,000	1,008,000	635,000	
6	Sumatera Barat	OP	245,000	310,000	987,000	555,000	
7	Sumatera Selatan	OP	268,000	384,000	860,000	652,000	
8	Lampung	OP	261,000	373,000	836,000	634,000	
9	Bengkulu	OP	250,000	373,000	973,000	623,000	
10	Bangka Belitung	OP	305,000	400,000	925,000	705,000	
11	Banten	OP	395,000	468,000	919,000	863,000	
12	Jawa Barat	OP	426,000	530,000	1,110,000	956,000	
13	DKI Jakarta	OP	433,000	510,000	1,216,000	943,000	
14	Jawa Tengah	OP	232,000	309,000	749,000	541,000	
15	DI Yogyakarta	OP	250,000	405,000	963,000	655,000	
16	Jawa Timur	OP	357,000	406,000	1,784,000	763,000	
17	Bali	OP	375,000	490,000	1,500,000	865,000	
18	Nusa Tenggara Barat	OP	368,000	530,000	1,001,000	898,000	

NO	URAIAN				SATUAN	BESARAN (Rp.)
19	Nusa Tenggara Timur	OP	308,000	388,000	1,088,000	696,000
20	Kalimantan Barat	OP	337,000	400,000	810,000	737,000
21	Kalimantan Tengah	OP	317,000	487,000	1,267,000	804,000
22	Kalimantan Selatan	OP	264,000	360,000	930,000	624,000
23	Kalimantan Timur	OP	274,000	365,000	863,000	639,000
24	Kalimantan Utara	OP	274,000	350,000	848,000	624,000
25	Sulawesi Utara	OP	273,000	350,000	870,000	623,000
26	Gorontalo	OP	215,000	393,000	1,338,000	608,000
27	Sulawesi Barat	OP	264,000	382,000	856,000	646,000
28	Sulawesi Selatan	OP	290,000	410,000	1,574,000	700,000
29	Sulawesi Tengah	OP	283,000	389,000	1,013,000	672,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	237,000	350,000	800,000	587,000
31	Maluku	OP	306,000	454,000	1,300,000	760,000
32	Maluku Utara	OP	316,000	498,000	850,000	814,000
33	Papua	OP	318,000	536,000	1,863,000	854,000
34	Papua Barat	OP	292,000	526,000	1,752,000	818,000
1.18	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II					
NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	300,000	330,000	772,000	630,000
2	Sumatera Utara	OP	178,000	275,000	746,000	453,000
3	Riau	OP	185,000	245,000	591,000	430,000
4	Kepulauan Riau	OP	227,000	273,000	625,000	500,000
5	Jambi	OP	215,000	301,000	840,000	516,000
6	Sumatera Barat	OP	173,000	240,000	663,000	413,000
7	Sumatera Selatan	OP	218,000	293,000	745,000	511,000
8	Lampung	OP	216,000	270,000	640,000	486,000
9	Bengkulu	OP	214,000	284,000	912,000	498,000
10	Bangka Belitung	OP	299,000	385,000	804,000	684,000
11	Banten	OP	275,000	354,000	837,000	629,000
12	Jawa Barat	OP	331,000	398,000	822,000	729,000
13	DKI Jakarta	OP	354,000	433,000	1,197,000	787,000
14	Jawa Tengah	OP	191,000	263,000	675,000	454,000
15	DI Yogyakarta	OP	210,000	310,000	750,000	520,000
16	Jawa Timur	OP	338,000	395,000	1,352,000	733,000
17	Bali	OP	330,000	441,000	1,182,000	771,000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	280,000	420,000	764,000	700,000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	271,000	377,000	825,000	648,000
20	Kalimantan Barat	OP	250,000	331,000	664,000	581,000
21	Kalimantan Tengah	OP	242,000	340,000	1,031,000	582,000
22	Kalimantan Selatan	OP	194,000	295,000	734,000	489,000
23	Kalimantan Timur	OP	207,000	302,000	750,000	509,000
24	Kalimantan Utara	OP	207,000	302,000	750,000	509,000
25	Sulawesi Utara	OP	185,000	270,000	737,000	455,000
26	Gorontalo	OP	175,000	250,000	1,299,000	425,000
27	Sulawesi Barat	OP	235,000	323,000	792,000	558,000
28	Sulawesi Selatan	OP	206,000	320,000	1,127,000	526,000
29	Sulawesi Tengah	OP	234,000	385,000	738,000	619,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	195,000	295,000	688,000	490,000
31	Maluku	OP	253,000	346,000	724,000	599,000
32	Maluku Utara	OP	169,000	354,000	669,000	523,000
33	Papua	OP	293,000	478,000	990,000	771,000
34	Papua Barat	OP	284,000	421,000	1,120,000	705,000
1.19.	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LUAR KANTOR					
NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	Aceh	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
2	Sumatera Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
3	Riau	OH	130,000	130,000	85,000	130,000

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp.)	
4	Kepulauan Riau	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
5	Jambi	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
6	Sumatera Barat	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
7	Sumatera Selatan	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
8	Lampung	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
9	Bengkulu	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
10	Bangka Belitung	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
11	Banten	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
12	Jawa Barat	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
13	DKI Jakarta	OH	180,000	180,000	130,000	180,000
14	Jawa Tengah	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
15	DI Yogyakarta	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
16	Jawa Timur	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
17	Bali	OH	160,000	160,000	115,000	160,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
20	Kalimantan Barat	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
21	Kalimantan Tengah	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
22	Kalimantan Selatan	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
23	Kalimantan Timur	OH	15,000	15,000	105,000	15,000
24	Kalimantan Utara	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
25	Sulawesi Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
26	Gorontalo	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
27	Sulawesi Barat	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
29	Sulawesi Tengah	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
31	Maluku	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
32	Maluku Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
33	Papua	OH	200,000	200,000	140,000	200,000
34	Papua Barat	OH	160,000	160,000	115,000	160,000
D.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS					
1.20.	KENDARAAN DINAS PEJABAT					
NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II			UNIT	482,074,000	
1.21.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)					
NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	
1	Pengadaan Kendaraan Kendaraan Operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)	UNIT	219,606,000	335,431,000	479,479,000	
1.22.	KENDARAAN OPERASIONAL BUS					
NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN	
1	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil			UNIT	360,942,000	
2	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang			UNIT	718,252,000	
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar			UNIT	1,184,787,000	
1.23.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)					
NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN	
1	Kendaraan Operasional Kantor			UNIT	25,000,000	
2	Kendaraan Operasional Lapangan			UNIT	35,600,000	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN : II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2.1.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	2.1.1 Honorarium Narasumber	OJ	1,700,000
	2.1.2 Honorarium Moderator	OK	1,000,000
	2.1.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	750,000

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	PADANG	5,530,000	2,952,000
2	BALIK PAPAN	PADANG	10,942,000	5,369,000
3	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6,439,000	3,380,000
4	BANDUNG	PADANG	6,129,000	3,508,000
5	BANJARMASIN	PADANG	9,006,000	4,642,000
6	BATAM	PADANG	8,653,000	4,546,000
7	BIAK	PADANG	16,932,000	8,728,000
8	DENPASAR	PADANG	9,049,000	4,888,000
9	JAYAPURA	PADANG	17,381,000	9,327,000
10	YOGYAKARTA	PADANG	7,969,000	4,000,000
11	KENDARI	PADANG	11,167,000	5,722,000
12	MALANG	PADANG	8,418,000	4,385,000
13	MANADO	PADANG	14,012,000	6,546,000
14	MATARAM	PADANG	9,060,000	4,867,000
15	PADANG	MAKASAR	10,974,000	5,402,000
16	PADANG	PONTIANAK	8,193,000	4,460,000
17	PADANG	SEMARANG	7,744,000	3,925,000
18	PADANG	SOLO	7,744,000	4,065,000
19	PADANG	SURABAYA	9,199,000	4,364,000
20	PADANG	TIMIKA	16,718,000	8,685,000
21	PALANGKARAYA	PADANG	8,760,000	4,642,000
22	PANGKAL PINANG	PADANG	7,337,000	3,883,000
23	JAKARTA	AMBON	13,285,000	7,081,000
24	JAKARTA	BALIK PAPAN	7,412,000	3,797,000
25	JAKARTA	BANDA ACEH	7,519,000	4,492,000
26	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2,407,000	1,583,000
27	JAKARTA	BANJAR MASIN	5,252,000	2,995,000
28	JAKARTA	BATAM	4,867,000	2,888,000
29	JAKARTA	BENGKULU	4,364,000	2,621,000
30	JAKARTA	BIAK	14,065,000	7,519,000
31	JAKARTA	DENPASAR	5,305,000	3,262,000
32	JAKARTA	GORONTALO	7,231,000	4,824,000
33	JAKARTA	JAMBI	4,065,000	2,460,000
34	JAKARTA	JAYAPURA	14,568,000	8,193,000
35	JAKARTA	YOGYAKARTA	4,107,000	2,268,000
36	JAKARTA	KENDARI	7,658,000	4,182,000
37	JAKARTA	KUPANG	9,413,000	5,081,000
38	JAKARTA	MAKASAR	7,444,000	3,829,000
39	JAKARTA	MALANG	4,599,000	2,695,000
40	JAKARTA	MAMUJU	7,295,000	4,867,000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
41	JAKARTA	MANADO	10,824,000	5,102,000
42	JAKARTA	MANOKWARI	16,226,000	10,824,000
43	JAKARTA	MATARAM	5,316,000	3,230,000
44	JAKARTA	MEDAN	7,252,000	3,808,000
45	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,984,000	2,984,000
46	JAKARTA	PALEMBANG	3,861,000	2,268,000
47	JAKARTA	PALU	9,348,000	5,113,000
48	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3,412,000	2,139,000
49	JAKARTA	PEKANBARU	5,583,000	3,016,000
50	JAKARTA	PONTIANAK	4,353,000	2,781,000
51	JAKARTA	SEMARANG	3,861,000	2,182,000
52	JAKARTA	SOLO	3,861,000	2,342,000
53	JAKARTA	SURABAYA	5,466,000	2,674,000
54	JAKARTA	TERNATE	10,001,000	6,664,000
55	JAKARTA	TIMIKA	13,830,000	7,487,000

2.3. SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	OKL	123,000
2	Sumatera Utara	OKL	232,000
3	Riau	OKL	94,000
4	Kepulauan Riau	OKL	137,000
5	Jambi	OKL	147,000
6	Sumatera Barat	OKL	190,000
7	Sumatera Selatan	OKL	128,000
8	Lampung	OKL	167,000
9	Bengkulu	OKL	109,000
10	Bangka Belitung	OKL	90,000
11	Banten	OKL	446,000
12	Jawa Barat	OKL	166,000
13	DKI Jakarta	OKL	256,000
14	Jawa Tengah	OKL	75,000
15	DI Yogyakarta	OKL	118,000
16	Jawa Timur	OKL	194,000
17	Bali	OKL	159,000
18	Nusa Tenggara Barat	OKL	231,000
19	Nusa Tenggara Timur	OKL	108,000
20	Kalimantan Barat	OKL	135,000
21	Kalimantan Tengah	OKL	111,000
22	Kalimantan Selatan	OKL	150,000
23	Kalimantan Timur	OKL	450,000
24	Kalimantan Utara	OKL	102,000
25	Sulawesi Utara	OKL	138,000
26	Gorontalo	OKL	240,000
27	Sulawesi Barat	OKL	313,000
28	Sulawesi Selatan	OKL	145,000
29	Sulawesi Tengah	OKL	165,000
30	Sulawesi Tenggara	OKL	171,000
31	Maluku	OKL	240,000
32	Maluku Utara	OKL	215,000
33	Papua	OKL	431,000
34	Papua Barat	OKL	182,000

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KOTA BUKITTINGGI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT (PULANG PERGI/PP)

NO	DAERAH TUJUAN	SATUAN	KENDARAAN DENGAN KAPASITAS SILINDER		
			Diatas 2001 cc (PP)	1601 s.d 2000 cc (PP)	1000 s.d 1600 cc (PP)
1	Kabupaten Mentawai	Ltr/Kend	Disesuaikan	Disesuaikan	Disesuaikan
2	Kabupaten Pasaman	Ltr/Kend	27	23	18
3	Kabupaten Pasaman Barat	Ltr/Kend	53	44	35

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN
4	Kabupaten Pesisir Selatan	Ltr/Kend	50	41	33
5	Kabupaten Dharmasraya	Ltr/Kend	68	56	45
6	Kabupaten Sijunjung	Ltr/Kend	44	36	29
7	Kabupaten Tanah Datar	Ltr/Kend	15	13	10
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	Ltr/Kend	18	15	12
9	Kabupaten Solok	Ltr/Kend	33	28	22
10	Kabupaten Solok Selatan	Ltr/Kend	84	69	55
11	Kabupaten Agam :				
12	- Radius sampai 10 km dari pusat kota Bukittinggi	Ltr/Kend	6	3	2
13	- Radius sampai 20 km dari pusat kota Bukittinggi	Ltr/Kend	8	6	4
14	- Lubuk Basung	Ltr/Kend	24	20	16
15	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	Ltr/Kend	29	24	19
16	Kota Payakumbuh	Ltr/Kend	12	10	8
17	Kota Sawah Lunto	Ltr/Kend	32	26	21
18	Kota Pariaman	Ltr/Kend	29	24	19
19	Kota Solok	Ltr/Kend	26	21	17
20	Kota Padang Panjang	Ltr/Kend	8	6	4
21	Kota Padang	Ltr/Kend	35	30	25
2.4.A	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN TRANSPORTASI DALAM KOTA BUKITTINGGI				
				SATUAN	BESARAN
	Kegiatan kurang dari 8 (delapan) jam di dalam Kota Bukittinggi			orang/pp	25,000
2.5.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)				
NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	
1	JAKARTA	KOTA BEKASI	Orang/Kali	284,000	
2	JAKARTA	KAB. BEKASI	Orang/Kali	284,000	
3	JAKARTA	KAB. BOGOR	Orang/Kali	300,000	
4	JAKARTA	KOTA. BOGOR	Orang/Kali	300,000	
5	JAKARTA	KOTA. DEPOK	Orang/Kali	275,000	
6	JAKARTA	KOTA. TANGERANG	Orang/Kali	286,000	
7	JAKARTA	KAB.TANGERANG SELATAN	Orang/Kali	286,000	
8	JAKARTA	KAB. TANGERANG	Orang/Kali	310,000	
9	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	Orang/Kali	428,000	
C.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT				
2.6.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT				
NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)	
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON 1/ SETARA	ORANG/KALI	65,000	30,000	
2	RAPAT BIASA	ORANG/KALI	44,000	17,000	
D.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN				
2.7.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI				
NO	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
1	Pemeliharaan gedung atau bangunan kantor	m ² /tahun	182,000	124,000	10,000
2.8.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT				
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
I	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	UNIT/TAHUN	41,900,000		
II	ANGGOTA DPRD	UNIT/TAHUN	41,000,000		
III	PEJABAT ESELON I	UNIT/TAHUN	40,000,000		
IV	PEJABAT ESELON II	UNIT/TAHUN	39,190,000		
2.9.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				
NO	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	UNIT/TAHUN	20,000,000.00	36,930,000.00	3,850,000
2.10.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT				

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR	UNIT/TAHUN	9,750,000
2	RODA 6	UNIT/TAHUN	37,110,000
3	SPEED BOAT	UNIT/TAHUN	20,240,000
2.11.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	INVENTARIS KANTOR	PEGAWAI/TAHUN	80,000
2	PERSONAL COMPUTER / NOTEBOOK	UNIT/TAHUN	730,000
3	PRINTER	UNIT/TAHUN	690,000
4	AC SPLIT	UNIT/TAHUN	610,000
5	GENSET LEBIH KECIL DARI 50 KVA	UNIT/TAHUN	7,190,000
6	GENSET 75 KVA	UNIT/TAHUN	8,640,000
7	GENSET 100 KVA	UNIT/TAHUN	10,150,000
8	GENSET 125 KVA	UNIT/TAHUN	10,780,000
9	GENSET 150 KVA	UNIT/TAHUN	13,260,000
10	GENSET 175 KVA	UNIT/TAHUN	14,810,000
11	GENSET 200 KVA	UNIT/TAHUN	15,850,000
12	GENSET 250 KVA	UNIT/TAHUN	16,790,000
13	GENSET 275 KVA	UNIT/TAHUN	17,760,000
14	GENSET 300 KVA	UNIT/TAHUN	20,960,000
15	GENSET 350 KVA	UNIT/TAHUN	22,960,000
16	GENSET 450 KVA	UNIT/TAHUN	25,620,000
17	GENSET 500 KVA	UNIT/TAHUN	31,770,000

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN : III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 PASAL 3 AYAT 2
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

NO	URAIAN					
A	HONORARIUM					
3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit SKPD, Staf Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Bendahara SKPD					
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Pengguna Anggaran	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD	Staf Penatausahaan Keuangan SKPD	Pembantu Bendahara SKPD
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	50,000	30,000	20,000	15,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	100,000	60,000	40,000	30,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	150,000	90,000	60,000	45,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	200,000	120,000	80,000	60,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	275,000	170,000	115,000	85,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	350,000	220,000	150,000	110,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	425,000	270,000	185,000	135,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	500,000	320,000	220,000	160,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	575,000	370,000	255,000	185,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	650,000	420,000	290,000	210,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	725,000	470,000	325,000	235,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	800,000	520,000	360,000	260,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	875,000	570,000	395,000	285,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	950,000	620,000	430,000	310,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	1,025,000	670,000	465,000	335,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	1,100,000	720,000	500,000	360,000
3.1.1	Honorarium Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					
	Honorarium Bendahara BOS	OB			800,000	
3.2	Honorarium Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah				Satuan	Harga Satuan
		OB			2,500,000	
3.3	Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)				Satuan	Harga Satuan
		OB			1,200,000	
3.4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					
3.4.1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang (konstruksi)					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB			500,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB			600,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB			750,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB			1,000,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB			1,500,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB			2,000,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB			2,500,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB			3,000,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB			3,500,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar	OB			4,000,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar	OB			4,500,000	
3.4.2	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang (Non konstruksi)					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB			400,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB			500,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB			600,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB			750,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB			900,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB			1,150,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB			1,500,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB			2,000,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB			2,500,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar	OB			3,000,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar	OB			3,500,000	

NO	URAIAN				
3.4.3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan jasa (Non konstruksi)				
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	250,000		
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	350,000		
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	450,000		
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	600,000		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	750,000		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	900,000		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	1,150,000		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1,400,000		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	1,750,000		
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. 100 Milyar	OB	2,000,000		
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar	OB	2,250,000		
3.5.	Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan				
3.5.1	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)				
	Uraian	Satuan	Harga Satuan		
	a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa Lainnya	OP	250,000		
	b. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konsultansi	OP	150,000		
3.5.2	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)				
	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi				
	Uraian	Satuan	Konstruksi	Barang dan Jasa Lainnya	Jasa Konsultansi
	- Ketua (1 org)	OP	300,000	250,000	250,000
	- Sekretaris (1 org)	OP	250,000	225,000	225,000
	- Anggota (1 org)	OP	200,000	175,000	175,000
3.6.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) untuk Kegiatan Infrastruktur / Fisik / Konstruksi				
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Harga Satuan		
	- Kurang Dari Rp. 100 Juta	OBK	150,000		
	- Dari Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OBK	200,000		
	- Diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OBK	350,000		
	- Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 750 juta	OBK	400,000		
	- Diatas Rp. 750 juta sd. Rp. 1 Miliar	OBK	500,000		
	- Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OBK	650,000		
	- Diatas Rp. 2.5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OBK	750,000		
	- Diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OBK	1,000,000		
	- Diatas Rp. 10 Miliar s.d 25 Miliar	OBK	1,250,000		
	- Diatas Rp. 25 Miliar s.d 50 Miliar	OBK	1,500,000		
	- Rp. 50 Miliar s.d 100 Miliar	OBK	1,750,000		
	- Diatas 100 Miliar	OBK	2,000,000		
3.7.	Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola				
3.7.1	Nilai pagu dana s/d Rp. 200 Juta	Satuan	Harga Satuan		
	- Perencana	OBK	250,000		
	- Pelaksana	OBK	350,000		
	- Pengawas	OBK	250,000		
	- Sekretariat	OBK	150,000		
3.7.2	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta				
	- Perencana	OBK	300,000		
	- Pelaksana	OBK	400,000		
	- Pengawas	OBK	300,000		
	- Sekretariat	OBK	200,000		
3.7.3	Honorarium Tim Teknis Perencanaan				
	- Penanggung Jawab	OP	250,000		
	- Quantity Surveyor	OP	250,000		
	- Drafter	OP	200,000		
	- Surveyor	OP	200,000		

NO	URAIAN					
3.8.	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah					
	NILAI ASET	Satuan	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Pengurus Barang
	Sampai dengan 1 Miliar	OB	150,000	400,000	375,000	275,000
	Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar	OB	175,000	450,000	400,000	300,000
	Diatas 2 Miliar s/d 5 Miliar	OB	200,000	500,000	450,000	350,000
	Diatas 5 Miliar s/d 10 Miliar	OB	225,000	550,000	500,000	400,000
	Diatas 10 Miliar s/d 20 Miliar	OB	250,000	600,000	550,000	425,000
	Diatas 20 Miliar s/d 30 Miliar	OB	275,000	650,000	575,000	450,000
	Diatas 30 Miliar s/d 50 Miliar	OB	300,000	700,000	600,000	475,000
	Diatas 50 Miliar s/d 75 Miliar	OB	325,000	750,000	625,000	500,000
	Diatas 75 Miliar s/d 150 Miliar	OB	350,000	800,000	650,000	525,000
	Diatas 150 Miliar s/d 300 Miliar	OB	375,000	825,000	650,000	550,000
	Diatas 300 Miliar	OB	400,000	850,000	650,000	575,000
	Pengelola BMD	OB	1,000,000	900,000		850,000
3.9.	Honorarium Kegiatan Lomba-Lomba					
3.9.1	Honorarium Tim Penilai / Juri / Wasit					
	URAIAN	SATUAN	KECAMATAN	KOTA	PROVINSI	NASIONAL
	Tim Penilai / Juri / Wasit	OH	100,000	175,000	250,000	1,000,000
3.9.2	Honorarium Tim Official					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Tim Official				OH	150,000
3.9.3	Honorarium Pelatih					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Olahraga				OH	150,000
	- Pelatih Kegiatan Perlombaan di Bidang Sains				OH	500,000
	- Instruktur				OH	100,000
3.9.4	Honorarium Atlit / Kontingen					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Honorarium Atlit/kontingen				OH	50,000
3.9.5	Honorarium Tim Penyusun/Pemeriksa /Pembuat Soal Lomba dan Keabsahan					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Honorarium Tim Penyusun/Pemeriksa/Pembuat Soal Lomba dan Keabsahan				OL	100,000
3.9.6	Honorarium Panitia Pertandingan					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Honorarium Panitia Pertandingan				OH	150,000
3.10.	Honorarium Pendukung Acara Seremonial / Upacara/ Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	Pembaca Ayat suci Alquran				OK	100,000
	Pembaca Doa				OK	100,000
	Sanggar Kesenian				OK	3,000,000
	Organ Tunggal				OK	2,000,000
	Pramusaji				OK	100,000
	Pelaksana Upacara dan Kegiatan				OK	100,000
	Kareografer / Komposer				OK	5,000,000
	Penata Rias				OK	100,000
3.11.	Honorarium untuk Penyuluh dan Pendamping					
3.11.1	Honorarium Pengurus LPM					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	- Ketua				OB	400,000
	- Sekretaris				OB	375,000
	- Bendaharan LPM				OB	375,000
3.11.2	Honorarium Ketua RW/ RT					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	- Ketua RW				OB	400,000
	- Ketua RT				OB	375,000
3.11.3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pendampingan kesehatan					
	Uraian				Satuan	Harga Satuan
	- Kader Posyandu Balita				OKL	100,000
	- Kader Posyandu Lansia				OKL	75,000
	- Kader Poskeskel				OKL	325,000

NO	URAIAN		
3.11.4	Honorarium Guru TPA / MDA / Garin / Guru Swasta		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Guru TPA / MDA / Garin / Guru Swasta	OB	500,000
3.11.5	Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / Pendamping/Penyelia KUBE / PPKBK / Sub PPKBK / Satlinmas		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Pendamping/Penyelia KUBE/PPKBK/Sub PPKBK/Satlinmas	OB	100,000
3.11.6	Honorarium Masyarakat yang terlibat dalam Tim/Kepanitiaan kegiatan Pemerintah Daerah		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Masyarakat yang terlibat dalam Tim/Kepanitiaan kegiatan Pemerintah Daerah	OB	100,000
3.11.7	Honorarium Pengurus Penggerak PKK Kota Bukittinggi		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Penanggung Jawab	OK	1,200,000
	- Wakil Penanggung Jawab	OK	1,080,000
	- Ketua	OK	960,000
	- Wakil Ketua Pelaksana	OK	840,000
	- Sekretaris	OK	600,000
	- Anggota	OK	480,000
3.11.8	Honorarium Jumpa Pers		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Jumpa Pers	OK	100,000
3.11.9	Honorarium Penyelenggaraan Jenazah Kasus Bencana/Penyandang Masalah Sosial		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Honorarium penyelenggaraan jenazah	Jenazah	150,000
	- Honorarium penguburan jenazah	Jenazah	450,000
3.11.10	Honorarium Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Veteran Pejuang untuk menghadiri HUT RI	OH	100,000
3.11.11	Belanja Jasa Advokat Bidang TUN / Perdata / Pidana		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Jasa Advokat Bidang TUN / Perdata / Pidana	Orang/ Paket	45,000,000
3.11.12	Belanja Jasa Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademis	Orang/ Produk	5,000,000
	- Jasa Tenaga Ahli Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	Orang/ Produk	1,000,000
3.12.	Honorarium Pendataan, Survey, Pendistribusian / Penyetoran dan Penilaian		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Supervisor		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	300
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	600
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	900
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	1,200
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	1,500
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	1,800
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	2,100
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	2,400
	- Petugas pendata sekaligus penginput data		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	1,000
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	2,000
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	4,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	5,000
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	6,000
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	7,000
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	8,000

NO	URAIAN		
	- Petugas pendata		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	750
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	1,500
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	2,250
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	3,750
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	4,500
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	5,250
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	6,000
	- Petugas entri data		
	Entri data form isian ke aplikasi :		
	s/d 10 item pertanyaan / form isian	form	500
	11 s/d 20 item pertanyaan / form isian	form	1,000
	21 s/d 30 item pertanyaan / form isian	form	1,500
	31 s/d 40 item pertanyaan / form isian	form	2,000
	41 s/d 50 item pertanyaan / form isian	form	2,500
	51 s/d 60 item pertanyaan / form isian	form	3,000
	61 s/d 70 item pertanyaan / form isian	form	3,500
	diatas 70 item pertanyaan / form isian	form	4,000
	- Pendistribusian SPPT	Lbr SPPT	2,000
	- Penyetoran / Pengembalian SPPT	Lbr SPPT	2,000
	- Penilai Angka Kredit	org/bahan	35,000
3.13.	Honorarium Tim Sidang Pelanggaran Perda		
3.13.1	Honorarium Penegakan Hukum		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	1. Hakim Pengadilan Negeri	OKss	175,000
	2. Jaksa Eksekutur	OKss	150,000
	3. Panitera	OKss	150,000
	4. Korwas PPNS/KBO Reskrim Polres Bukittinggi	OKss	150,000
	5. PPNS Kota Bukittinggi	OKss	150,000
	6. PAM Eksekutor Putusan Sidang	OKss	100,000
	7. Saksi Ahli Perkara	OKss	150,000
	8. Saksi Perakara	OKss	100,000
3.13.2	Honorarium Penegakan Denda Upaya Paksa		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	* Petugas Pencatat Barang Bukti	OKss	20,000
	* Petugas Pemeriksa		
	a. Proses Denda	OKss	50,000
	b. Proses Surat Pernyataan	OKss	30,000
3.13.3	Honorarium Kegiatan Operasional Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	* PNS		
	- Ketua	OB	1,200,000
	- Ketua Harian	OB	1,050,000
	- Wakil Ketua	OB	900,000
	- Korwas PPNS	OB	900,000
	- Sekretaris	OB	900,000
	- Wakil Sekretaris	OB	900,000
	- Koordinator Bidang	OB	600,000
	- Anggota Bidang	OB	450,000
	- Anggota Sekretariat	OB	300,000
	* Non PNS		
	- Penanggung Jawab	OB	1,500,000
	- Wakil Penanggung Jawab	OB	1,300,000
3.13.4	Honorarium Penyelidikan/ Penyidikan		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Pemeriksaan PPNS ke TKP	OKI	150,000
	- Menghadirkan TSK dan Saksi	OKI	80,000
	- Penyitaan Barang Bukti	OKI	80,000

NO	URAIAN		
3.13.5	Honorarium Penuntutan/ Sidang di Pengadilan Negeri		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Hakim	OS	150,000
	- Kuasa Jaksa	OS	150,000
	- Panitera PN	OS	100,000
	- Saksi Ahli	OS	150,000
	- Saksi Perkara	OS	90,000
3.13.6	Honorarium Eksekusi/ Pelaksanaan Putusan Pengadilan		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Jaksa Eksekutor	OS	150,000
	- Kuasa Jaksa/ Penuntut Umum	OS	150,000
	- Penyidik PPNS	OS	100,000
	- Pengamanan Eksekusi	OK	85,000
	- Sopir Mobil Eksekusi	OK	60,000
3.14.	Honorarium untuk Instansi Vertikal yang membantu/mendukung program Pemerintah Daerah		
3.14.1.	Honorarium Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota		
	Penanggung Jawab	OH	100,000
	Koordinator	OH	90,000
	Petugas Pelaksana	OH	80,000
	- Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan		
	Penanggung Jawab	OH	50,000
	Koordinator	OH	40,000
	Petugas Pelaksana	OH	30,000
3.14.2.	Honorarium Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Kepala Kejaksaan Negeri	OB	2,500,000
	- Kasi Pada Kejaksaan Negeri	OB	1,500,000
	- Jaksa Pengacara Negara	OB	1,000,000
3.15.	Honorarium Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama		
	URAIAN	Satuan	Harga Satuan
	- Ketua (Pelaksana Seleksi)	OK	5,500,000
	- Anggota (Pelaksana Seleksi/ Evaluasi)	OK	4,000,000
B	BARANG DAN JASA		
3.16.	Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja		
3.16.1	a.Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	1. Pegawai Kontrak	OB	2,484,041
	2. Pegawai Kontrak Harian	OH	90,000
	3. Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko	OB	2,984,041
	4. Pegawai Kontrak yang Mempunyai Beban Kerja Lebih	OB	2,984,041
	5. Pegawai Kontrak Profesional		
	- Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	3,900,000
	- Tenaga Programmer dan Perencana	OB	5,000,000
	b.Belanja Jasa Upah Kerja dan Insentif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
	Upah Pegawai Kontrak Dokter Spesialis	OB	5,000,000
	Insentif Dokter Spesialis	OB	15,000,000
	c.Belanja Iuran Jaminan / Asuransi		
	iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN		sesuai tarif
	iuran jaminan kematian bagi non ASN		sesuai tarif
	iuran jaminan kesehatan bagi non ASN		sesuai tarif
3.16.2	Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Bukittinggi.	OB	500,000
	Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	OT	1,000,000

NO	URAIAN		
3.17.	UANG LEMBUR		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
3.17.1	Uang Lembur Hari Kerja / Hari Libur Biasa		
	- PNS Golongan IV	OJ	13,000
	- PNS Golongan III	OJ	10,500
	- PNS Golongan II	OJ	8,500
	- PNS Golongan I	OJ	7,500
	- Non PNS / Pegawai Tidak Tetap	OJ	7,500
	- Danru / PTI PNS	OJ	10,500
	- Wadanru PNS	OJ	9,000
	- Danru / Wadanru Non PNS	OJ	8,000
3.17.2	Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	- Uang Lembur Khusus SKPD	OH	200,000
	- Uang Lembur Khusus Pantap	OH	250,000
	- Uang lembur Khusus Tata Usaha Pimpinan (TUP) untuk Non ASN	OH	25,000
3.17.3	Uang Makan Lembur		
	- Uang Makan Lembur	OH	25,000
3.18.	Belanja Jasa Kantor		
	Belanja Jasa Pemeliharaan		
3.18.1	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Pengelolaan Sampah		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Kendaraan operasional pengelolaan/pengangkutan sampah		
	a. Betor	Unit/Tahun	28,476,250
	b. Dump Truck	Unit/Tahun	218,462,000
	c. Telescopic	Unit/Tahun	236,672,500
	d. Skeeed Loader	Unit/Tahun	242,672,500
	e. Gerobak :		
	- Gerobak 1 (satu) roda	Unit/Tahun	280,000
	- Gerobak 2 (dua) roda	Unit/Tahun	500,000
	f. Road Sweper	Unit/Tahun	85,999,000
	g. Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	8,010,000
	h. Mesin Chain Shaw	Unit/Tahun	5,465,000
	i. Mesin Penyiram	Unit/Tahun	16,400,000
	j. Mesin Apung	Unit/Tahun	3,850,000
	k. Perahu Karet	Unit/Tahun	2,000,000
3.19.	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi		
3.19.1	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian		
	Uraian	Satuan	Harga Satuan
	Ukuran 1 halaman warna	kali	8,000,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	6,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	4,000,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	3,000,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	2,000,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	1,500,000
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3,000,000
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100,000
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	1,000,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000
3.19.2	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid		
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,000,000
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	2,000,000
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	1,500,000
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,000,000
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,000,000
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	500,000
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3,000,000
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100,000
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	1,000,000
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000

NO	URAIAN			
3.19.3	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan			
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,500,000	
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	2,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,500,000	
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,250,000	
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750,000	
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000	
3.19.4	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid			
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,500,000	
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	2,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,500,000	
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,250,000	
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750,000	
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000	
3.19.5	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Majalah Nasional			
	Ukuran 1 halaman	kali	1,500,000	
	Ukuran 1/2 halaman	kali	750,000	
3.19.6	Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Online			
	Ukuran 1 Kali Tayang	kali	150,000	
	Iklan / Apresiasi	kali	100,000	
3.19.7	Liputan Kegiatan Pemko			
	Media Cetak	OM	150,000	
	Media Elektronik	OM	200,000	
	Media Siaran Langsung Radio	kali	1,500,000	
	Media TV Nasional	1	ls	
	Biaya Penggantian Berita/Foto/Kegiatan Pemerintah Kota yang dimuat wartawan dalam media	kali	20,000	
	Rekaman Pidato	kali	500,000	
3.19.8	Iklan			
	Pembuatan spot iklan layanan di radio	kali	100,000	
	Berita/iklan layanan di media internet/website	kali	100,000	
	Pembuatan spot/iklan layanan TV		Sesuai Tarif	
3.20.	Belanja Surat Kabar dan Majalah			sesuai tarif
3.21.	Belanja Jasa Kawat/ Faximili / Internet			sesuai tarif
3.21.a	Belanja Tagihan Telepon			Sesuai Tarif
3.21.b	Belanja Tagihan Air			Sesuai Tarif
3.21.c	Belanja Tagihan Listrik			Sesuai Tarif
3.21.d	Belanja Penambahan Daya			Sesuai Tarif
3.21.e	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,Air, dan Listrik			Sesuai Tarif
3.21.f	Belanja Jasa Konsultansi			LS
3.21.g	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			Sesuai Tarif
3.21.h	Belanja Jasa Penggantian Kerugian			Sesuai hasil keputusan pemeriksaan dan penelitian
3.22.	Belanja Paket/ Pengiriman			sesuai tarif
3.23.	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan			
	Uraian	Satuan	Kapasitas Ruangan	
			Besar	Sedang
			Kecil	
	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan	Tempat/ Hari	250,000	150,000
			100,000	
3.24.	Belanja Sewa Ruang / Rumah / Gedung Pertemuan			
	Sewa Stand Pameran			Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Biasa		RH	500,000
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Kecil			Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sedang			Sesuai Tarif
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Besar			Sesuai Tarif
3.25.	Belanja Makanan dan Minuman			
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian/Lembur			
	Makan	Porsi	25,000	
	Minum	Porsi	15,000	

NO	URAIAN							
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan							
	Makan							
	Makan berupa nasi bungkus			Porsi	25,000			
	Makan berupa nasi kotak lengkap / jasa catering			Porsi	30,000			
	Makan untuk kegiatan/event internasional			Porsi	150,000			
	Snack							
	Snack Biasa			Porsi	8,000			
	Snack Sedang / Snack dengan menggunakan jasa catering			Porsi	12,500			
	Snack Berat			Porsi	15,000			
	Snack untuk kegiatan/event internasional			Porsi	49,000			
	Kegiatan Rapat / Pertemuan Unsur Pimpinan Daerah / Pimpinan SKPD (Coffee Morning)				Sesuai Tarif			
	Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah / Tamu Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota				Sesuai Tarif			
	Kegiatan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah di Rumah Makan/Restoran/ Hotel				Sesuai Tarif			
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Field Trip							
	Biaya Konsumsi			OH	25,000			
3.26.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya							
	1. Belanja Pakaian Kerja			Satuan	Harga Satuan			
	Pakaian Kerja Khusus				Sesuai Tarif			
	2. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu							
	Pakaian Olah Raga			Stel	350,000			
	Pakaian Khusus Kegiatan			Baju	250,000			
3.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga							
3.27.1	Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward)							
	a. Hadiah Lomba Perorangan							
	Tingkatan Juara Lomba			Satuan	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota		
	Juara I			PL	400,000	750,000		
	Juara II			PL	300,000	500,000		
	Juara III			PL	250,000	300,000		
	Harapan I			PL		250,000		
	Harapan II			PL		200,000		
	Harapan III			PL		100,000		
	b. Hadiah Lomba Grup							
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Grup Tingkat Kecamatan			Grup Tingkat Kota		
			2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih	2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih
	Juara I	PL	750,000	1,250,000	2,000,000	1,500,000	2,500,000	4,000,000
	Juara II	PL	600,000	1,000,000	1,600,000	1,200,000	2,000,000	3,200,000
	Juara III	PL	450,000	750,000	1,200,000	900,000	1,500,000	2,400,000
	Harapan I	PL	300,000	500,000	800,000	500,000	800,000	1,500,000
	Harapan II	PL	200,000	350,000	600,000	400,000	600,000	1,000,000
	Harapan III	PL	100,000	200,000	400,000	300,000	400,000	750,000
3.27.2	Uang Penghargaan Atas Prestasi Siswa							
	a. Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik							
	Tingkatan Juara Lomba			Satuan	SD/MI	SMP/	SMA/	
	- Juara I			Org.	1,000,000	1,500,000	2,000,000	
	- Juara II			Org.	900,000	1,300,000	1,800,000	
	- Juara III			Org.	800,000	1,100,000	1,600,000	
	b. Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi							
	Tingkatan Juara Lomba			Satuan	Provinsi	Nasional	Internasional	
	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi			Org.			5,000,000	
	- Juara I			Org.	1,000,000	2,000,000		
	- Juara II			Org.	800,000	1,500,000		
	- Juara III			Org.	600,000	1,000,000		
	Duo			Grup			2,500,000	
	Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang			Grup	3,000,000	5,000,000	10,000,000	
	c. Uang Penghargaan Untuk Guru Berprestasi							
				Satuan	Kota	Provinsi	Nasional	
	Penghargaan Guru Berprestasi			Org.	5,000,000	7,500,000	10,000,000	
3.27.3	Hadiah Pemenang Seleksi Duta Pelajar/Mahasiswa Genre							
	Tingkatan Juara Lomba			Satuan	Kota	Provinsi	Nasional	
	- Juara I (Pa-Pi)			Orang	2,500,000			
	- Juara II (Pa-Pi)			Orang	1,500,000			
	- Juara III (Pa-Pi)			Orang	1,000,000			
	- Juara Kategori (Pa-Pi)			Orang	500,000			

NO	URAIAN								
3.27.4	Hadiah Lomba Kepariwisataaan								
	a. Hadiah Pemilihan Duta Wisata Bujang Jo Gadih								
	Tingkatan Juara Lomba		Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Juara I Bujang Bukittinggi		Orang	1,500,000					
	Juara I Gadih Bukittinggi		Orang	1,500,000					
	Wakil I Bujang Bukittinggi		Orang	1,250,000					
	Wakil I Gadih Bukittinggi		Orang	1,250,000					
	Wakil II Bujang Bukittinggi		Orang	1,000,000					
	Wakil II Gadih Bukittinggi		Orang	1,000,000					
	Bujang Favorit		Orang	750,000					
	Gadih Favorit		Orang	750,000					
	Duta Intelegensi		Orang	750,000					
	Duta Persahabatan		Orang	750,000					
	b. Hadiah Lomba Lagu Perorangan Tingkat Kota								
	Tingkatan Juara Lomba		Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Pemenang I (Pa dan Pi)		Orang	1,250,000					
	Pemenang II (Pa dan Pi)		Orang	1,000,000					
	Pemenang III (Pa dan Pi)		Orang	750,000					
	Harapan I (Pa dan Pi)		Orang	500,000					
	Harapan II (Pa dan Pi)		Orang	500,000					
	c. Hadiah Lomba Lagu Perjuangan Siswa/Siswi Tingkat SLTP dan Tingkat SLTA se-Kota Bukittinggi								
	Tingkatan Juara Lomba		Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Hadiah Pemenang I (Pa/Pi)		Orang	1,250,000					
	Hadiah Pemenang II (Pa/Pi)		Orang	1,000,000					
	Hadiah Pemenang III (Pa/Pi)		Orang	750,000					
	Hadiah Harapan I (Pa/Pi)		Orang	500,000					
	Hadiah Harapan II (Pa/Pi)		Orang	500,000					
	d. Penghargaan Atas Prestasi Siswa								
	Hadiah Lomba Mewakili Kota Bukittinggi								
	Tingkatan Juara Lomba		Satuan	Kota	Provinsi	Nasional			
	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi		Org.				5,000,000		
	- Juara I		Org.	1,000,000	2,000,000				
	- Juara II		Org.	800,000	1,500,000				
	- Juara III		Org.	600,000	1,000,000				
	Duo		Grup				2,500,000		
	Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang		Grup	3,000,000	5,000,000		10,000,000		
	e. Hadiah Lomba Fotografi Pariwisata Tingkat Provinsi								
	Tingkatan Juara Lomba			Satuan	Pelajar	Umum			
	Juara I			Orang	2,500,000	7,500,000			
	Juara II			Orang	2,000,000	5,000,000			
	Juara III			Orang	1,500,000	3,000,000			
	Harapan I			Orang	1,000,000	1,500,000			
Harapan II			Orang	750,000	1,000,000				
Harapan III			Orang	500,000	750,000				
3.27.5	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga								
	Hadiah Lomba Perorangan								
	Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan)		Satuan	JUARA					
		PL	I	II	III				
			250,000	200,000	150,000				
3.27.6	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga								
	a. Hadiah Lomba Perorangan								
	URAIAN		Satuan	JUARA					
				I	II	III	Harapan I	Harapan II	Harapan III
	Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi		PL	35,000,000	12,500,000	7,500,000			
	Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kota Bukittinggi		PL	7,500,000	3,500,000	2,500,000			
	Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Kota Bukittinggi		PL	5,000,000	2,500,000	1,500,000			
	Lomba Camat Terbaik		PL	8,000,000					
	Lomba Sekretaris Camat Terbaik		PL	5,500,000					
	Penyelenggara Manunggal Sakato Terbaik		PL	7,500,000	5,000,000	2,500,000			
	Lomba Didikan Subuh Tingkat Kota		PL	10,000,000	7,500,000	5,000,000	3,000,000	2,500,000	2,000,000
Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota		PL	3,000,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	750,000	

NO	URAIAN					
	b. Penghargaan / Hadiah Terkait Dengan Kegiatan / Perlombaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat					
	URAIAN	SATUAN	UMUM	JUARA		
				I	II	III
	Hadiah Kegiatan Khatam Al Qur'an	PL	1,000,000	800,000	500,000	300,000
	Hadiah Lomba MTQ Kota Bukittinggi	OK	1,000,000	600,000	400,000	250,000
	c. Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak					
	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak	Org/ Akseptor	50,000			
	d. Hadiah Lomba / Penghargaan Lainnya					
	URAIAN	SATUAN	UMUM	JUARA		
				I	II	III
	Hadiah Perlombaan Lainnya	PL	850,000	750,000	500,000	300,000
3.27.7	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					
	a. Hadiah Lomba Perorangan					
	URAIAN	Satuan	JUARA			
			I	II	III	
	Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan)	PL	150,000	100,000	75,000	
	b. Kegiatan Posyandu					
	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN			
	Pemberian makan tambahan Posyandu Balita / Lansia	Posyandu/ Kegiatan	75,000			
3.27.8	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga					
	a. Hadiah Lomba / Penghargaan Lomba					
	URAIAN	Satuan	JUARA			
			I	II	III	
	- Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan	PL	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	- Lomba Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan	PL	3,000,000	2,500,000	1,500,000	
	- Lomba Sekretaris Lurah Terbaik Tingkat Kecamatan	PL	2,500,000	2,000,000	1,000,000	
	b. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga /Penghargaan (Reward)					
	KELURAHAN					
	Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				Realisasi Penerimaan 100% Wajib Pajak 65%	
	(Rupiah)				September	November
	a	-	s/d	100,000,000	4,000,000	3,000,000
	b	100,000,001	s/d	200,000,000	5,000,000	4,000,000
	c	200,000,001	s/d	300,000,000	6,000,000	5,000,000
	d	300,000,001	s/d	400,000,000	7,000,000	6,000,000
	e	Pencapaian target di atas		400,000,000	8,000,000	7,000,000
	KECAMATAN					
	Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Realisasi Penerimaan 100% seluruh Kelurahan				4,000,000	3,000,000
	c. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga					
	Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward)					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan			
	Juara I	PL	10,000,000			
	Juara II	PL	8,000,000			
	Juara III	PL	7,000,000			
	Harapan I	PL	5,000,000			
	Harapan II	PL	4,000,000			
	Harapan III	PL	3,500,000			
	Penghargaan kepada peserta yang dokumennya diserahkan kepada panitia	Peserta	400,000			
3.28.	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas					
	1 BBM Operasional/Mobilitas Rutin Bulanan					
	a. Pejabat Negara , Pejabat Daerah dan PNS Tk. A di Daerah					
	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	Ltr/Kend	Sesuai Kebutuhan			
	b. Pejabat Struktural					
		Satuan	Harga Satuan			
	Eselon II.b	Liter/Hari	5			
	Eselon III.a	Liter/Hari	4			
	Eselon III.b	Liter/Hari	3.5			
	Eselon IV	Liter/Hari	1.5			
	Eselon V	Liter/Hari	1			

NO	URAIAN		
		Satuan	Harga Satuan
	c. Bendahara, Pengurus Barang/Surat Berharga, Pengawas Pendidikan, Penilik Pendidikan, Caraka, Pengawas Bangunan, Pengawas Alat Berat dan PPTK Konstruksi serta Pejabat Fungsional Tertentu lainnya.	Liter/Hari	1
2 Operasional/Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)			
a. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Standby			
		Satuan	Harga Satuan
	Kendaraan Dinas Roda 4		
	- Kapasitas Silinder > 2001 cc	Ltr/Kend	4
	- Kapasitas Silinder 1601 s/d 2000 cc	Ltr/Kend	3.5
	- Kapasitas Silinder 1000 s/d 1600 cc	Ltr/Kend	3
	Kendaraan Dinas Roda 2	Ltr/Kend	1
	Kendaraan Dinas Roda 2 Patwal (Dinas Perhubungan)	Ltr/Kend	1.5
Catatan Untuk angka 3.28 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas			
	- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas poin 1. a, b, dan c serta poin 2. a, merupakan uraian pemberian BBM untuk kendaraan dinas yang terdapat didalam komponen biaya pemeliharaan kendaraan dinas (Hanya diberikan Untuk kendaran Dinas)		
	- Jenis BBM yang digunakan adalah Pertalite / Solar, dapat menggunakan Jenis BBM lainnya apabila terjadi kelangkaan BBM yang dibutuhkan dengan membuat Persetujuan Pimpinan SKPD.		

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR